

Correlation Of The Number Of Participants Of Political Parties In The Election To The Vote Of A Political Party

Endro Tri Susdarwono
(susdarwonoenrottri@gmail.com)

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Peradaban

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai pengaruh jumlah peserta partai politik dalam pemilu terhadap perolehan suara partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pengujian hipotesis melalui distribusi Khai-kuadrat (chi-square distribution) dengan menerapkan metode korelasi Cramer C. Pengujian ini diterapkan dikarenakan hasil penelitian berupa data diskrit dan bersifat kategoris yang dikelompokkan dalam setidaknya dua kelompok sampel. Pengujian ini merupakan bentuk pengujian independensi guna menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Kedua variabel yang dimaksudkan adalah variabel yang dianggap sebagai variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Melalui perhitungan yang telah dilaksanakan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik ditolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik bisa diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik adalah 0,2194 atau 21,94%. Nilai korelasi sebesar itu memang tergolong rendah. Tetapi, kemungkinan adanya korelasi antara kedua hal itu telah bisa dipastikan.

Kata kunci: jumlah peserta pemilu, metode korelasi Cramer C, partai politik, suara partai politik

Abstract

This study aims to examine the effect of the number of political party participants in the election on the vote acquisition of political parties. This study uses a quantitative approach, testing the hypothesis through chi-square distribution by applying the Cramer C correlation method. This test is applied because the research results are discrete and categorical data that are grouped into at least two sample groups. This test is a form of independence testing to determine whether or not there is a relationship between two variables. The two variables in question are variables that are considered as independent variables and dependent variables. Through calculations that have been carried out, the null hypothesis which states that there is no correlation between the number of political parties participating in the election and the number of political parties' votes is rejected. Meanwhile, the alternative hypothesis which states that there is a correlation between the number of political parties participating in the election and the vote acquisition of political parties is acceptable. The level of closeness of the relationship that occurs between the number of political parties participating in the general election to the votes acquired by political parties is 0.2194 or 21.94%. The correlation value for it is quite low. However, the possibility of a correlation between the two has been confirmed.

Keywords: *Cramer C correlation method; number of election participants; political parties; political party votes*

PENDAHULUAN

Partai politik memainkan posisi sebagai pilar demokrasi, disebabkan partai politik tersebut berfungsi dalam memainkan peran penting sebagai hub atau penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens) [1]. Partai politik mempunyai peran sebagai wadah yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan akomodasi aspirasi juga kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama menjadi fokus atau *concern* dari partai politik. Dalam rangka menjalankan hal tersebut, kekuasaan dibutuhkan partai politik untuk membentuk kebijakan dengan cara penempatan perwakilannya dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dimana partai politik bertugas dalam merumuskan kepentingan bersama mengenai usul kebijakan yang diperjuangkan melalui parlemen untuk menjadi kebijakan umum, partai politik juga sebagai sarana rekrutmen politik dimana partai bertugas untuk menciptakan kader yang akan ditempatkan dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Menurut konteks kerangka negara demokrasi, seperti Indonesia, bukanlah menjadi sesuatu yang aneh jikalau terdapat sangat banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini justru sebagai perwujudan bentuk berjalannya demokrasi di Indonesia. Seperti halnya yang kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Pasal 28E ayat (3), bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi, dengan terdapatnya banyak partai politik yang mengambil bagian sebagai infrastruktur yang terlibat dalam “pelengkapan” suprastruktur negara, tidak menjamin negara tersebut dapat berjalan seperti apa yang diharapkan [2].

Sejak tahun 1955 Indonesia telah berhasil dalam menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (pemilu) [3]. Setelah pemilu tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pemilu, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu keharusan dalam konteks negara demokrasi disebabkan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan [4].

Pemilihan umum merupakan wadah arena kompetisi dalam mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi

syarat, peserta pemilihan umum dapat berupa perseorangan maupun partai politik akan tetapi paling utama adalah partai politik. Partai politik berinisiatif mengajukan kandidat dalam pemilihan umum untuk kemudian dipilih oleh rakyat [5]. Selain itu pemilihan umum (pemilu) dapat dikatakan sebagai ekspresi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat [6]. Sebuah kedaulatan yang bertumpu pada rakyat, bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Melalui ajang pemilu, rakyat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan legitimasi dan menjadi pemimpin setelahnya untuk menentukan kebijakan umum dalam sebuah negara [7].

Pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 terdapat sebanyak 48 kontestan partai politik (parpol) [8], sebagai hasil akhir dari pemilu tersebut, di DPR terdapat 21 parpol, pemilu 1999 melahirkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara berkategori signifikan dari rakyat Indonesia seperti halnya PDI Perjuangan, P. Golkar, PKB, PPP, dan PAN [9]. Kemudian pada waktu pemilu tahun 2004 diikuti kontestan Pemilu sebanyak 24 parpol, sebagai hasil akhir kontestansi tersebut, di DPR terdapat 16 parpol. Selanjutnya pada pemilu tahun 2009 diikuti kontestan pemilu sebanyak 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal Nangroe Aceh Darussalam (NAD) [10], hasil akhir dari pemilu tersebut, di DPR terdapat 9 parpol. Formasi anggota DPR periode 2009-2014 berjumlah 9 fraksi yang berasal dari partai-partai politik antara lain Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) [11].

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 terdapat 15 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik. Tiga diantara 15 partai politik tersebut adalah partai politik lokal, sehingga praktis dalam pemilu legislatif tahun 2014 “hanya” 12 yang ikut berpartisipasi secara nasional [12]. Hasil pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang menentukan parliamentary threshold sebesar 4% ternyata hanya mampu “menyingkirkan” satu partai politik saja di DPR, yaitu Partai Hanura. Dengan demikian otomatis sebenarnya jumlah partai politik yang ada di DPR nyaris tidak ada perubahan dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, selalu berkisar di angka 9 dan 10 [13].

Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai pengaruh jumlah peserta partai politik dalam

pemilu terhadap perolehan suara partai politik. variabel bebas dan variabel terikat yang terdiri dari beberapa kategori ditampilkan dalam suatu tabel, kemudian serangkaian prosedur serta perhitungan harus dilakukan dan kriteria pengujian harus dirumuskan guna menentukan status hipotesis nihil. Dalam artian apakah ia diterima atau justru harus tertolak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pengujian hipotesis melalui distribusi Khai-kuadrat (chi-square distribution) dengan menerapkan metode korelasi Cramer C. Pengujian ini diterapkan dikarenakan hasil penelitian berupa data diskrit dan bersifat kategoris yang dikelompokkan dalam setidaknya dua kelompok sampel. Pengujian ini merupakan bentuk pengujian independensi guna menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Kedua variabel yang dimaksudkan adalah variabel yang dianggap sebagai variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam metode pengujian hipotesis tersebut,

seandainya salah satu variabel baik variabel bebas, variabel terikat, maupun keduanya mempunyai kategori lebih dari 2, alat bantu analisis yang digunakan adalah tabel r x c. tabel tersebut terdiri atas beberapa baris (rows dan dilambangkan dengan r) serta beberapa kolom (column dan dilambangkan dengan c). sehubungan dengan analisis untuk memastikan ada atau tidaknya korelasi antara kedua variabel itu, tabel r x c dinamakan pula tabel kontinjensi. Sedangkan nilai koefisien korelasi yang ditentukan besarnya disebut nilai koefisien korelasi kontinjensi.

Tabel 1. kontinjensi terdiri atas sejumlah baris serta kolom. Misalnya saja, apabila variabel pertama dilambangkan sebagai A dan ditempatkan pada bagian baris, ia akan dibagi menjadi A1, A2, A3, hingga Ar. Sedangkan variabel kedua yang dilambangkan dengan B ditempatkan pada bagian kolom.; ia akan dipilah menjadi B1, B2, B3, hingga Bc. Secara garis besar, tabel kontinjensi yang digunakan sebagai alat bantu untuk menguji kebenaran hipotesis adalah seperti berikut:

Tabel 1. Bentuk Umum Tabel Kontinjensi dalam Analisis Korelasi Cramer C

Variabel	B1	B2	B3	Bc	Jumlah
A1	a11	a12	a13	a1c	R1
A2	a21	a22	a23	a2c	R2
A3	a31	a32	a33	a3c	R3
Ar	ar1	ar2	ar3	arc	Rr
Jumlah	C1	C2	C3	Cc	N

Besarnya nilai khai-kuadrat harus dihitung dengan menerapkan rumus di bawah ini. Namun, sebelumnya nilai frekuensi yang

$$C_r = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + (L - 1)}}$$

Dimana Cr merupakan nilai koefisien korelasi Cramer C, x^2 adalah nilai khai-kuadrat, dan n adalah jumlah seluruh frekuensi.

$$e_{ij} = \frac{(n_i \cdot n_j)}{n}$$

Dimana e_{ij} adalah nilai frekuensi yang diharapkan dari setiap sel, n_i merupakan jumlah frekuensi keseluruhan setiap baris, dan n_j merupakan jumlah frekuensi keseluruhan setiap kolom.

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Dimana X^2 adalah nilai khai-kuadrat hasil perhitungan, n_{ij} adalah frekuensi yang diperoleh

diharapkan serta nilai khai-kuadrat dalam setiap sel juga harus ditentukan.

dari hasil pengamatan pada baris I serta kolom j (sel tertentu). Sedangkan e_{ij} merupakan frekuensi yang diharapkan (expected frequencies) dari baris I dan kolom j.

Jika nilai khai-kuadrat hasil perhitungan lebih kecil atau sama dengan nilai khai-kuadrat dalam tabel, maka hipotesis nihil diterima. Dengan demikian, tidak ada korelasi antara kedua variabel dan kesimpulan ini sekaligus merupakan kesimpulan akhir. Sementara, jika nilai khai-kuadrat hasil perhitungan lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel, hipotesis nihil ditolak. Sehingga, korelasi antara kedua variabel memang ada. Kemudian, nilai koefisien korelasi Cramer C guna memastikan seberapa kuatnya korelasi yang terjadi perlu dihitung melalui formulasi di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semula, partai politik hanya berfungsi artikulatif, yakni sebagai fasilitator antara

rakyat dan pemegang kebijakan. Dalam perkembangannya, partai politik dianggap sebagai media yang cukup representative untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan public. Melalui system ketatanegaraan yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik, pemerintahan mendapatkan masukan-masukan bagaimana seharusnya kebijakan public diarahkan. Para ahli menyatakan, disinilah tempat sesungguhnya bagaimana negara dan warga negara berinteraksi.

Berbagai kepentingan di balik didirikannya partai dari berbagai kelompok di dalam masyarakat tidak dapat lepas dari asal usul partai politik dan habitat politik di mana mereka tinggal. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi histori yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislative (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai alat memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat negara maju dalam mana kelompok masyarakat yang kepentingannya kurang terwakili dalam system kepartaian yang ada membentuk partai sendiri.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan

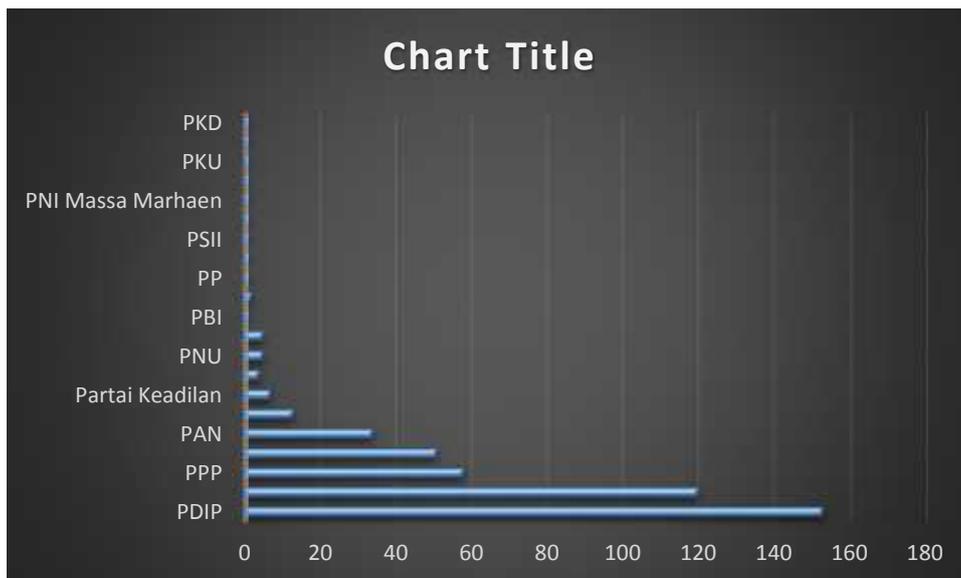
masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industry, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan gerakan populis.

Teori ketiga melihat modernisasi social ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi social ekonomi. Dengan demikian, teori ketiga ini memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya. Jika teori kedua mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis, maka teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik.

Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

Tabel 2. Partai Pemilu Peserta Pemilu tahun 1999

Nama Partai	Nama Partai
1. Partai Indonesia Baru.	26. PNI-Front Marhaenis.
2. Partai Kristen Nasional Indonesia	27. Partai Ikatan Pend.Kmd. Indonesia
3. Partai Nasional Indonesia	28. Partai Republik.
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia.	29. Partai Islam Demokrat.
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia.	30. PNI-Massa Marhaen.
6. Partai Ummat Islam.	31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak.
7. Partai Kebangkitan Umat.	32. Partai Demokrasi Indonesia.
8. Partai Masyumi Baru	33. Partai Golongan Karya.
9. Partai Persatuan Pembangunan.	34. Partai Persatuan.
10. Partai Syarikat Islam Indonesia.	35. Partai Kebangkitan Bangsa.
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.	36. Partai Uni Demokrasi Indonesia.
12. Partai Abul Yatama.	37. Partai Buruh Nasional.
13. Partai Kebangsaan Merdeka.	38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa.	39. Partai Daulat Rakyat.
15. Partai Amanat Nasional.	40. Partai Cinta Damai.
16. Partai Rakyat Demokratik.	41. Partai Keadilan dan Persatuan.
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.	42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia.
18. Partai Katholik Demokrat.	43. Partai Nasional Bangsa Indonesia.
19. Partai Pilihan Rakyat.	44. Partai Bhinneka Tunggal Ika.
20. Partai Rakyat Indonesia.	45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia.
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.	46. Partai Nasional Demokrat.
22. Partai Bulan Bintang.	47. Partai Umat Muslimin Indonesia.
23. Partai Solidaritas Pekerja.	48. Partai Pekerja Indonesia
24. Partai Keadilan	
25. Partai Nahdlatul Umat	



Gambar 1. Grafik Partai yang Mendapatkan Kursi DPR di Pemilu 1999

Sedangkan pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai partai. Pemilu 2004 memberlakukan

sistem electoral threshold sebesar tiga persen perolehan suara Pemilu 1999. Beberapa partai

yang pada Pemilu 1999 tak mencapai perolehan suara tiga persen kemudian berganti nama untuk bisa mengikuti Pemilu 2004. Salah satunya, Partai Keadilan yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Partai peserta Pemilu 2004 yakni: PDI-P, PPP, PKB, Golkar, PAN, PBB, PKS, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Merdeka, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

Partai Golkar menduduki peringkat tertinggi dengan meraih 128 kursi. Urutan berikutnya disabet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan angka 109 kursi. Sementara di urutan ketiga justru diraih Partai Persatuan Pembangunan dengan 58 kursi, selanjutnya Partai Demokrat hadir di posisi keempat dengan hasil 57 kursi, status PKB malah melorot di urutan kelima disusul Partai Amanat Nasional, yang sama-sama memperoleh 52 kursi. Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertengger di posisi keenam dalam perolehan suara, kini berada di posisi ketujuh dengan 45 kursi.

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Ketentuan electoral threshold pada pemilu

sebelumnya dihapus dan diganti dengan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. Dari 38 partai, hanya 9 yang lolos parliamentary threshold dan berhak mendapat kursi di DPR yakni Demokrat dengan 21.703.137 suara atau 20,85 persen; Golkar dengan 15.037.757 suara atau 14,45 persen; dan PDI-P dengan 14.600.091 suara atau 14,03 persen. Posisi keempat hingga keenam ditempati PKS dengan 8.206.955 suara atau 7,88 persen; PAN dengan 6.254.580 suara atau 6,01 persen, dan PPP dengan 5.533.214 suara atau 5,32 persen. Selanjutnya, posisi ketujuh hingga kesembilan adalah PKB dengan 5.146.122 atau 4,94 persen; Gerindra dengan 4.646.406 suara atau 4,46 persen, dan terakhir Hanura dengan 3.922.870 suara atau 3,77 persen.

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai yakni PDI-P, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI. Dari 12 partai itu, hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5 persen perolehan suara. Kesepuluh partai yang melenggang ke DPR adalah PDI Perjuangan (18,95 persen), Golkar (14,75 persen), Gerindra (11,81 persen), Demokrat (10,19 persen), PKB (9,04 persen), PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), Nasdem (6,72 persen) PPP (6,53 persen), Hanura (5,26 persen). Sementara itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2014.



Gambar 2. Perolehan Suara Partai Politik di Pemilu 2014

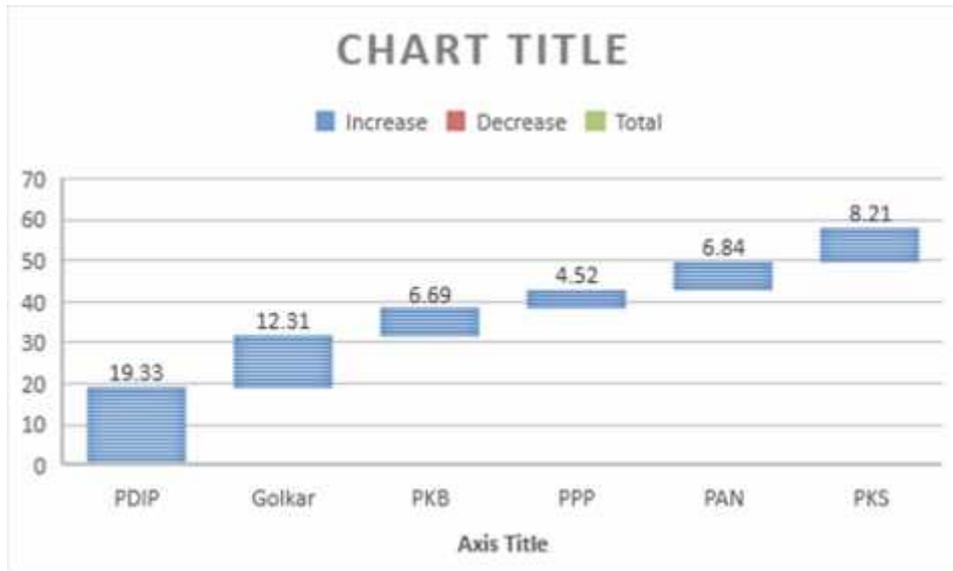
Sementara pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik. Dari sejumlah itu, hanya 9 partai politik yang memenuhi ketentuan ambang

batas parlemen sebanyak 4% meliputi: PDIP (27.053.961), Gerindra (17.594.839), Golkar (17.229.789), PKB (13.570.097), NasDem

Jurnal Poros Politik
ISSN : 2528 - 0953

(12.661.792), PKS (11.493.663), Demokrat (10.876.507), PAN (9.572.623), dan PPP (6.323.147). sedangkan partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen meliputi:

Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI. Berikut persentase perolehan partai politik yang dijadikan sampel dalam pemilu 2019:



Gambar 3. Persentase Perolehan Partai Politik Yang Dijadikan Sampel dalam Pemilu 2019

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Politik dalam 5 Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara Partai Politik						Jumlah
	PDIP	Golkar	PKB	PPP	PAN	PKS	
48 (1999)	153	120	51	58	34	7	423
24 (2004)	109	127	52	58	53	45	444
38 (2009)	95	107	27	37	43	57	366
12 (2014)	109	91	47	39	49	40	375
16 (2019)	128	85	58	19	44	50	384
Jumlah	594	530	235	211	223	199	1992

Secara garis besar, proses pengujian hipotesis dalam metode analisis korelasi kontinjensi dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Merumuskan hipotesis, hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik. Sementara, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik. Secara simbolis, hipotesis nihil dan hipotesis alternative adalah sebagai berikut:

- H0 : Tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik
- H1 : ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik

Menentukan taraf signifikansi tertentu, mengingat metode korelasi kontinjensi melibatkan distribusi khai-kuadrat, taraf signifikansi yang bisa ditentukan terdiri dari 5%, 2,50%, 1%, dan 0,05%. Taraf signifikansi tersebut harus dipadankan dengan derajat kebebasan baris dikalikan dengan derajat kebebasan kolom. Padanaan antara taraf signifikansi dan hasil peralihan dengan kedua derajat kebebasan itu menentukan nilai khai-kuadrat dalam tabel distribusinya. Berkaitan dengan penelitian kasus ini, taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 2,50%. Sedangkan, derajat kebebasannya adalah 20. Nilai derajat kebebasan itu berasal dari hasil perkalian derajat kebebasan baris 4 (5 – 1) dengan derajat kebebasan kolom 5 (6 – 1). Berdasarkan hasil penelusuran dalam tabel, nilai khai-kuadrat bagi taraf signifikansi 2,50% dan derajat kebebasan 20 adalah 34,170. Nilai khai-kuadrat dalam tabel tersebut merupakan

dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir.

Merumuskan kriteria pengujian, karena nilai khai-kuadrat dalam tabel telah diketahui besarnya, yaitu 34,170, kriteria pengujian dapat dirumuskan. Dengan demikian, kriteria pengujian yang berlaku adalah bahwa hipotesis nihil bisa diterima apabila

$$X^2 \leq 34,170$$

Dan hipotesis nihil dinyatakan tertolak jika

$$X^2 > 34,170$$

Menghitung nilai khai-kuadrat dan nilai koefisien Cramer C, sebelum nilai khai-kuadrat hasil perhitungan diketahui besarnya, nilai frekuensi yang diharapkan dari setiap sela harus dihitung lebih dahulu. Nilai setiap selnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Tabel Kerja Metode Cramer C

$e_{11} = \frac{423 \times 594}{1992} = 126$	$e_{12} = \frac{423 \times 530}{1992} = 113$	$e_{13} = \frac{423 \times 235}{1992} = 50$
$e_{21} = \frac{444 \times 594}{1992} = 132$	$e_{22} = \frac{444 \times 530}{1992} = 118$	$e_{23} = \frac{444 \times 235}{1992} = 52$
$e_{31} = \frac{366 \times 594}{1992} = 109$	$e_{32} = \frac{366 \times 530}{1992} = 97$	$e_{33} = \frac{366 \times 235}{1992} = 43$
$e_{41} = \frac{375 \times 594}{1992} = 112$	$e_{42} = \frac{375 \times 530}{1992} = 100$	$e_{43} = \frac{375 \times 235}{1992} = 44$
$e_{51} = \frac{384 \times 594}{1992} = 115$	$e_{52} = \frac{384 \times 530}{1992} = 102$	$e_{53} = \frac{384 \times 235}{1992} = 45$

$e_{14} = \frac{423 \times 211}{1992} = 45$	$e_{15} = \frac{423 \times 223}{1992} = 47$	$e_{16} = \frac{423 \times 199}{1992} = 42$
$e_{24} = \frac{444 \times 211}{1992} = 47$	$e_{25} = \frac{444 \times 223}{1992} = 50$	$e_{26} = \frac{444 \times 199}{1992} = 44$
$e_{34} = \frac{366 \times 211}{1992} = 39$	$e_{35} = \frac{366 \times 223}{1992} = 41$	$e_{36} = \frac{366 \times 199}{1992} = 37$
$e_{44} = \frac{375 \times 211}{1992} = 40$	$e_{45} = \frac{375 \times 223}{1992} = 42$	$e_{46} = \frac{375 \times 199}{1992} = 37$
$e_{54} = \frac{384 \times 211}{1992} = 41$	$e_{55} = \frac{384 \times 223}{1992} = 43$	$e_{56} = \frac{384 \times 199}{1992} = 38$

Nilai frekuensi yang diharapkan dalam setiap sel tersebut ditampilkan secara bersama-sama dengan frekuensi yang sesungguhnya. Hal ini

dilakukan dengan tujuan agar ia mudah dipahami dan perhitungan untuk menentukan nilai khai-kuadrat lebih mudah dilaksanakan.

Tabel 5. *Frekuensi yang Diharapkan dan Frekuensi Sesungguhnya*

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara Partai Politik						Jumlah
	PDIP	Golkar	PKB	PPP	PAN	PKS	
48 (1999)	153 (126)	120 (113)	51 (50)	58 (45)	34 (47)	7 (42)	423
24 (2004)	109 (132)	127 (118)	52 (52)	58 (47)	53 (50)	45 (44)	444
38 (2009)	95 (109)	107 (97)	27 (43)	37 (39)	43 (41)	57 (37)	366
12 (2014)	109 (112)	91 (100)	47 (44)	39 (40)	49 (42)	40 (37)	375
16 (2019)	128 (115)	85 (102)	58 (45)	19 (41)	44 (43)	50 (38)	384
Jumlah	594	530	235	211	223	199	1992

Setelah itu, nilai khai-kuadrat dalam setiap sel dihitung. Besarnya nilai khai-kuadrat pada penelitian kasus ini adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{(153 - 126)^2}{126} + \frac{(120 - 113)^2}{113} + \frac{(51 - 50)^2}{50} + \frac{(58 - 45)^2}{45} + \frac{(34 - 47)^2}{47} + \frac{(7 - 42)^2}{42} + \\ & \frac{(109 - 132)^2}{132} + \frac{(127 - 118)^2}{118} + \frac{(52 - 52)^2}{52} + \frac{(58 - 47)^2}{47} + \frac{(53 - 50)^2}{50} + \frac{(45 - 44)^2}{44} + \\ & \frac{(95 - 109)^2}{109} + \frac{(107 - 97)^2}{97} + \frac{(27 - 43)^2}{43} + \frac{(37 - 39)^2}{39} + \frac{(43 - 41)^2}{41} + \frac{(57 - 37)^2}{37} + \\ & \frac{(109 - 112)^2}{112} + \frac{(91 - 100)^2}{100} + \frac{(47 - 44)^2}{44} + \frac{(39 - 40)^2}{40} + \frac{(49 - 42)^2}{42} + \frac{(40 - 37)^2}{37} + \\ & \frac{(128 - 115)^2}{115} + \frac{(85 - 102)^2}{102} + \frac{(58 - 45)^2}{45} + \frac{(19 - 41)^2}{41} + \frac{(44 - 43)^2}{43} + \frac{(50 - 38)^2}{38} = \\ & 5,7795 + 0,4354 + 0,0200 + 3,7718 + 3,5689 + 28,9889 + 3,9955 + 0,6857 + 0 + 2,5728 + \\ & 0,1811 + 0,0225 + 1,7959 + 1,0269 + 5,9290 + 0,1032 + 0,0976 + 10,9400 + 0,0805 + 0,8118 \\ & + 0,2034 + 0,0252 + 1,1672 + 0,2402 + 1,4759 + 2,8287 + 3,7306 + 11,8993 + 0,0233 + \\ & 3,7538 = 96,1546 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai khai-kuadrat adalah 96,154. Nilai khai-kuadrat hasil perhitungan itu lebih besar dari pada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 34,170. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik ditolak. Pada konteks keadaan ini, jumlah partai politik peserta pemilu mempunyai korelasi dengan perolehan suara partai politik.

Karena ternyata pada kedua variabel itu terjadi korelasi, seberapa jauh variabel jumlah partai politik peserta pemilu memiliki korelasi dengan perolehan suara partai politik perlu dihitung dengan formula nilai koefisien

Cramer C. nilainya dalam penelitian ini adalah:

$$\sqrt{\frac{96,154}{1992 + (5 - 1)}} = \sqrt{0,048174} = 0,2194$$

Sehingga nilainya adalah 21,94%

KESIMPULAN

Melalui perhitungan yang telah dilaksanakan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik ditolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap

perolehan suara partai politik bisa diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik adalah 0,2194 atau 21,94%. Nilai korelasi sebesar itu memang tergolong rendah. Tetapi, kemungkinan adanya korelasi antara kedua hal itu telah bisa dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- [2]. Hasibuan, SD. Fuji Lestari dan Yonnawati. (2020). Pemberlakuan Parliamentary Threshold dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1-10.
- [3]. Al-Fatih, Sholahuddin. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38.
- [4]. Rokhim, Abdul. (2011). Pemilihan Umum dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 85-94.
- [5]. Rohaniah, Yoyoh dan Efriza. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- [6]. Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. (2013). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [7]. Rannie, Mahesa dan Laurel Heydir. (2020). Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 168-183.
- [8]. Pahlevi, Indra. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Jurnal Politika*, 5 (2), 111-135.
- [9]. Busroh, Firman Freaddy. (2017). Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 513-524.
- [10]. Erna, Sri Wibawanti. (2009). Saatnya Electoral Threshold Dilaksanakan Secara Konsisten Menuju Multi Partai Terbatas. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 10-11.
- [11]. Toha, Miftah. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12]. Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [13]. Sudarsana, Agun Gunanjar. (2019). *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.